LAPORAN RISET

INDEKS DEMOKRASI ASIA 2011: POTRET INDONESIA

Disusun oleh:
Pusat Kajian Politik, Departemen Ilmu Politik
FISIP Universitas Indonesia (PUSKAPOL)
dan
Center for Democracy and Human Rights (DEMOS)

Asian Democracy Index Consortium (Indonesia)

Dokumen ini dibuat untuk kepentingan pemaparan hasil riset dalam
Seminar (De)Monopolisasi Demokrasi di Asia
yang diselenggarakan di FISIP UI, 25 November 2011.
Dokumen ini berupa draft, dan tidak dipublikasikan.

TIM PENELITI

Anton Pradjasto
Dirga Ardiansa
Irwansyah
Roichatul Aswidah
Sri Budi Eko Wardani
Wawan Ichwanuddin
Yolanda Asianna Panjaitan

Bagian I. LATAR BELAKANG

Proses demokratisasi di Indonesia telah berlangsung selama 13 tahun sejak jatuhnya Presiden Soeharto pada 1998. Dinamika, karakter dan kinerja serta masa depan demokrasi Indonesia menjadi kajian banyak ahli ilmu politik.[2] Indonesia bukan hanya dianggap sebagai negara demokratis terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Lebih dari itu Indonesia juga diakui sebagai negara muslim demokratis terbesar di dunia.[3] Demokratisasi di Indonesia kemudian menjadi penting untuk menjadi perhatian.

Kajian atas demokrasi Indonesia menghasilkan penilaian yang beragam. Larry Diamond membuat perbandingan pergerakan demokrasi Indonesia dengan negara-negara Asia Selatan.[4] Diamond menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemajuan yang paling cepat dimana kualitasnya dan juga dukungan publik pada demokrasi mengalami kemajuan lebih cepat dibandingkan negara-negara Asia Selatan.[5] Argumen Diamond didasarkan pada tiga tipologi dimensional Juan Linz dan Alfred Stepan yaitu dimensi perlilaku, sikap dan komitmen konstitusional. Berdasarkan atas tiga tipologi dimensional ini Diamond mengutip Liddle dan Mujani yang menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia secara esensial telah terkonsolidasi. [6] Akan tetapi, Diamond mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia dapat mundur kembali. Beberapa fenomena sosial politik memberikan sinyalemen yang dapat mendukung kekhawatiran tersebut misalnya ditunjukkan oleh tingkat kekerasan politik dan belum adanya kejelasan sejauh mana partai dan gerakan Islam yang mendukung negara Syariah akan dapat menerima secara penuh komitmen konstitusional menjadi catatan tersendiri atas kemajuan tersebut. Selanjutnya, persis berdasarkan pada tiga tipologi dimensional tersebut, Diamond menjelaskan titik krusial yang mengkhawatirkan yaitu perilaku, sikap dan komitmen konstitusional para elit kunci yang tetap memiliki kemampuan untuk memperlemah atau memutar balik demokrasi Indonesia. [7]

Terlepas dari peringatannya tentang titik yang mengkhawatirkan itu, Diamond menjadi salah satu ahli politik yang melihat demokrasi Indonesia dengan kacamata optimisme. Akan tetapi ada pula ahli yang memiliki pandangan lebih pesimistis. Penilaian ahli atas demokrasi Indonesia menurut Aspinall terbagi dalam dua kutub berlawanan yaitu mereka yang menyatakan demokrasi

---

[2] Lihat Aspinall, E. dan Mietzner,M., (2010), "Problems of Democratisation in Indonesia; An Overview", dalam Aspinall, E. dan Mietzner,M (ed), *Problem of Democratisation in Indonesia; Elecyions, Institutions and Society*, hal. 1. Lihat juga Diamond, L., (2010), "Indonesia's Place in Global Democracy", dalam dalam Aspinall, E. dan Mietzner,M (ed), *Problem of Democratisation in Indonesia; Elecyions, Institutions and Society*, hal. 25

[3] Lihat Endy M. Bayuni, *Indonesia Riks Downgrade of Its Democratic Rating*, diakses di http://www.thejakartapost.com/news/2011/08/20/indonesia-risks-downgrade-its-democratic-rating.html pada 22 Agustus 2011

[4] Indonesia dalam hal ini dibandingkan oleh Diamond dengan Korea, Taiwan, Thailand, Phillippines dan Mongolia. Lihat Diamond, L., *op.cit* (note 2), hal 35-46

[5] *Ibid*, hal. 46

[6] *Ibid*., hal. 46-47. Diamond, Mujani dan Lidlle berkesimpulan demokrasi Indonesia terkonsolidasi secara esensial dengan mendasarkan pada argumen bahwa: a). pada perilaku, tidak ada kelompok politik yang saat ini mengancam untuk mengeluarkan demokrasi atau untuk keluar dari negara Indonesia; b). secara sikap, ada dukungan secara relatif substansial pada demokrasi sebagai bentuk pemerintahan terbaik; c). pada tingkat komitmen konstitusional, aktor politik dan sosial kunci berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan dan mengejar kepentingan mereka melalui proses konstitusional yaitu jalan tanpa kekerasan.

[7] *Ibid*

Indonesia telah terkonsolidasi dengan baik, terutama bila dibandingkan dengan negara lain. Di kutub lain terdapat ahli yang berpandangan bahwa demokrasi di Indonesia hanya bersifat artifisial dimana struktur kekuasaan intinya tidak berubah dan para oligark pada masa Orde Baru masih dapat terus bertahan serta mampu terus memanfaatkan negara untuk tujuan pengejaran rente. [8] Sementara itu kelompok ahli lainnya berpendapat demokrasi Indonesia telah mengalami kemajuan namun mengalami ketimpangan yang disebabkan oleh beratnya masalah korupsi dan lemahnya penegakan hukum.[9]

Di tengah pendapat beberapa ahli tersebut, beberapa lembaga mengeluarkan penilainnya atas demokrasi di Indonesia. *Freedom House* menempatkan Indonesia sebagai negara yang bebas penuh (*free*) dengan nilai hak politik lebih tinggi dibandingkan hak sipil.[10] Sementara itu *Economist Intellegence Unit* menempatkan Indonesia pada urutan ke-60 dalam kategori negara *flawed democracy* dengan skor total 6,53 (dalam skala 1-10).[11]

Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (DEMOS) pernah mencoba melakukan penilaian demokrasi Indonesia berdasarkan empat hal yang merupakan empat kelompok perangkat penting demokrasi yaitu: (1) legal dan hak; (2) representasi politik; (3) pemerintahan yang demokratik dan akuntabel; (4) keterlibatan dan partisipasi warga negara. Demos melakukan survey nasional pada 2003/04 dan 2007 yang menghasilkan indeks rata-rata demokrasi Indonesia masing-masing 37 dan 47 (skala 100).[12] Walaupun sedikit meningkat, namun dengan angka 47 (skala 100) dapat dinyatakan bahwa demokrasi Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengembangkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan angka 67,30 (dalam skala 1-100). [13] Pengembangan indeks ini didasari oleh keinginan untuk mengembangkan alat ukur guna menilai kemajuan demokrasi Indonesia menurut keadaan Indonesia sendiri.[14] Namun demikian, IDI yang mendasarkan pada tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi dinilai mendasarkan pada konsep demokrasi yang

---

[8] lihat Aspinnal, E., op.cit (note 2), hal. 1-2. Aspinnal dalam hal ini mengutip para ahli yaitu Robinson dan Hadiz,2004 serta Boudreau, 2009 untuk mereka yang menyatakan demokrasi Indonesia hanya artifisial. Sementara itu, Aspinall mengutip Ramage dan MacIntre untuk demokrasi telah terkonsolidasi. Aspinall menempatkan Davidson dan dirinya sendiri dalam posisi tengah.

[9] Diamond, L., *op.cit* (note 2), hal. 1-2

[10] Lihat Freedom in the World 2011, Freedom House. Indonesia diberi nilai 2 untuk hak politik dan 3 untuk hak-hak sipil dalam skala 1-7, dimana 1 untuk paling bebas dan 7 paling tidak bebas.

[11] Lihat Economist Intellegence Unit,, *Democracy Index 2010, Democracy in Retreat,* http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf, diakses pada 22 Agustus 2011

[12] Lihat Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Assi Manusia, DEMOS, *SATU DEKADE REFORMASI:Maju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia Ringkasan Eksekutif dan Laporan Awal Survei Nasional Kedua Masalah dan Pilihan Demokrasi di Indonesia (2007 – 2008*), hal. 19-21. Empat kelompok penting perangkat demokrasi memuat 32 perangkat demokrasi

[13] Indeks Demokrasi Indonesia dikembangkan oleh Bappenas bersama sejumlah ahli. Indeks ini memiliki tiga variabel yaitu Hak Sipil, Hak Politik dan Lembaga-lembaga Demokrasi. Lihat *Menakar Demokrasi di Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia 2009,* UNDP, 2011

[14] Lihat Kata Pengantar oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida S. Alisyahbana dalam *Menakar Demokrasi di Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia 2009,* UNDP, 2011

"*thin*" dan tidak memasukkan aspek penting seperti budaya politik.[15] Dengan demikian, IDI sulit untuk mengungkap gambaran yang lebih menyeluruh dari demokrasi Indonesia. Diperlukan sebuah pengukuran yang sesuai dengan keadaan Indonesia namun juga dapat menangkap demokrasi Indonesia secara lebih menyeluruh dengan demikian juga dapat menangkap masalah krusial yang muncul dalam demokrasi Indonesia.

Berdasarkan penilaian ahli di atas, nampaknya Indonesia mengalami perkembangan yang sama dengan wajah demokrasi di Asia. Beberapa negara seperti Korea Selatan dan Taiwan dinilai sebagai negara yang telah mencapai demokrasi prosedural dan memasuki era konsolidasi. Namun demikian, beberapa negara di Asia Selatan dan juga Thailand memasuki kemunduran. Selain itu beberapa negara di Asia telah melalui momen peralihan dari otoritarian, namun demikian demokrasi elektoral masih terancam, telah memiliki demokrasi prosedural dengan ketiadaan prinsip-prinsip demokrasi mendasar seperti partisipasi, representasi dan akuntabilitas. Selainjutnya, beberapa negara di Asia memberi gambaran bahwa demokratisasi yang terjadi tidak juga kunjung meningkatkan kualitas hidup rakyat. [16] Asia memberi pelajaran bahwa transisi dari otoritarianisme tidak selalu merupakan transisi ke demokrasi; capaian demokrasi elektoral tidak serta merta mewujudkan representasi serta transisi menuju demokrasi substantif tidak selalu akan begitu saja mengikuti transisi menuju demokrasi. [17]

Riset ini berangkat dari pemikiran bahwa perkembangan demokrasi di Asia memerlukan adanya kerangka baru dalam menilai demokrasi hingga dapat menjelaskan kompleksitas demokratisasi di Asia. Pengembangan Indeks demokrasi Asia didasari oleh pendefinisian kembali demokrasi dengan menjadikan pemaknaan transisi demokrasi sebagai demonopolisasi atas proses dan lembaga yang terjadi dalam area bidang politik, ekonomi maupun sosial. Demokrasi di sini memiliki dua prinsip yaitu liberalisasi dan ekualisasi. **Liberalisasi** dipakai untuk mengukur sejauh mana sektor-sektor yang berbeda memperoleh independensi dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Hal ini sangat **tergantung pada sejauh mana monopoli kekuatan lama terdisintegrasi.** Sementara itu ekualisasi dipakai untuk mengukur proses sejauh mana kelompok minoritas atau pun subaltern secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. **Ekualisasi dengan demikian adalah sebuah proses transformasi kekuasaan di setiap bidang yaitu politik, ekonomi maupun masyarakat sipil**.[18]

Perkembangan demokrasi Indonesia membutuhkan pengukuran yang dapat menangkap kerumitannnya. The Asian Democracy Indeks diharapkan menjadi sebuah alat yang bersifat alternaif uintuk melakukan evaluasi dan penilaian demokrasi Indonesia. Dengan demikian, masalah krusial dalam demokrasi Indonesia dapat diungkap dan langkah untuk terus memperbaik demokrasi Indonesia dapat dilakukan.

---

[15] Catatan Direktur of Public Affairs, Indonesian Survey Institute, Burhanuddin Muhtadi (tidak dipublikasikan) dalam Dinner Lecture " Demokrasi dan Ukuran-ukurannya; Sebuah Persoalan" yang diselenggarakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Jakarta, 9 Agustus 2011

[16] Lihat *The Asian Democracy Index, A Short Guide,* prepared by The Democracy and Social Movement (DASMI) of Sungkonghoe University, for the Presentatyion in the 2010 Seoul Democrcay Index Forum and Workshop 14-15 Octrober 2010

[17] *Ibid*

[18] *Ibid*

Bagian II. METODOLOGI

II. 1. Proses Pengukuran dan Asesmen

Asian Democracy Index menghasilkan suatu angka tunggal yang diperoleh dari penilaian para ahli (*expert judgement)* melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner, terhadap sejumlah indikator atau pertanyaan. Setiap ahli hanya memberikan penilaian atas indikator/ pertanyaan yang diajukan dengan range angka penilaian antara 1 – 10. Indikator/pertanyaan yang ditanyakan kepada ahli hanya yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya dari setiap indikator/pertanyaan yang telah diberikan penilaian oleh seluruh ahli, dilakukan pengukuran deskriptif statistik berupa ukuran pemusatan (mean, median, dan modus) dan tabulasi silang.

Pemilihan para ahli didasarkan pada tiga kriteria. Pertama berdasarkan bidang keahliannya, yang terdiri atas tiga bidang yaitu Ekonomi, Politik, dan Masyarakat Sipil. Kedua, berdasarkan spektrum pandangan ahli terhadap pemerintah yaitu Pro Pemerintah, Moderat, dan Anti Pemerintah. Kriteria ketiga berdasarkan posisi peran di masyarakat yaitu Akademisi, Praktisi, dan Politisi.

Selain itu, riset ini juga mengumpulkan data sekunder melalui penelusuran pustaka dari berbagai sumber yang terkait dengan kondisi pada tiga bidang tersebut. Tujuannya untuk mendukung informasi terkait pertanyaan dalam kuesioner.

II. 2. Profil Informan Ahli

DEMOS and PUSKAPOL UI mengumpulkan data dengan wawancara kuesioner pada 18 Juli hingga 15 Agustus 2011. Sebagaimana dijelaskan di atas, informan ahli didefinisikan sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian atas area/bidang yang menjadi fokus riset ini, seperti anggota parlemen (area politik), pelaku bisnis (area ekonomi), dan aktivis organisasi masyarakat sipil (sosial), serta akademisi atau peneliti yang fokus pada tiga area tersebut. Informan ahli yang diwawancara berjumlah 27 orang.

II.3. Hambatan Riset

Kendala pertama yang ditemui dalam penentuan informan riset ini adalah kesulitan menetapkan posisi informan ke dalam kategori spektrum posisi politik yang telah ditetapkan yaitu pro pemerintah, moderat, dan anti pemerintah. Sesungguhnya kategorisasi sudah mengalami perubahan dari disain awal yang mendasarkan diri pada spektrum ideologi (Liberal, moderat, konservatif). Namun terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi ideologi politik dari para ahli dan tokoh publik di Indonesia. Ini dapat dipahami sebagai kelanjutan dari situasi sosial politik yang mengalami de-idiologisasi dan depolitisasi selama 32 tahun era Suharto. Ideologi politik tidak diartikulasikan secara lugas dan terbuka di ruang sosial politik, baik oleh partai-partai politik maupun oleh tokoh-tokoh publik.

Dewasa ini keberanian mengusung dan mengekspresikan posisi ideologi politik yang berbeda secara terbuka dikembangkan oleh kelompok-kelompok fundamentalisme Islam garis keras. Dalam akomodasi kategori yang berdasarkan pro atau kontra terhadap pemerintah, posisi perwakilan dari kelompok fundamentalis sebetulnya juga agak problematik karena di satu sisi mereka mengusung pandangan politik yang menolak politik sekuler termasuk gagasan demokrasi tapi di sisi lain seringkali kita menemukan mereka mendapatkan pembiaran dari pemerintah.

Berkebalikan dengan para ekonom, yang sebetulnya dapat lebih mudah ditentukan ideologinya dari posisi mereka terhadap pasar dan intervensi negara dalam perekonomian. Kenyataannya hampir tidak ada ekonom di Indonesia yang mempropagandakan secara terbuka dukungan secara ideologis terhadap ekonomi pasar. Sementara posisi mendukung atau kontra pemerintah pun sebetulnya tidak terlalu mencolok. Maka paling mungkin dibedakan dari terlibat atau tidak dalam kerjasama atau pekerjaan untuk pemerintah.

Tim peneliti melakukan diskusi mendalam untuk melakukan asesmen mengenai tiap informan, memeriksa kecenderungan yang dapat ditangkap dari rekam jejak posisi dan pernyataan mereka. Penetapan bersifat interpretatif, dan dapat saja diperbaiki dalam metode studi index ini di masa depan. Sejauh ini pilihan informan dirasakan cukup akurat, dan mengkonfirmasi bahwa dalam setting demokrasi di Indonesia, landasan ideologi kurang menjadi acuan pilihan politik masyarakat. Posisi pro-kontra terhadap pemerintah juga sebetulnya tidak terlalu menjadi pembedaan yang tegas di masa transisi saat ini, ditandai oleh pemerintah yang bersifat koalisi dari berbagai kelompok dan tidak didasari persamaan ideologi dan program politik.

Beberapa tahun terakhir posisi pemerintah kurang popular akibat dilanda berbagai skandal korupsi, akibatnya lebih mudah untuk melihat siapa dari informan yang pro, kontra, atau moderat terhadap pemerintah. Ini menegaskan pilihan metode yang kami ambil untuk memodifikasi spektrum ideologi informan ahli menjadi posisi dukungan terhadap pemerintah.

Bagian III. TEMUAN RISET

Riset ini menghasilkan indeks yang merupakan pengolahan penilaian para informan ahli atas sejumlah pertanyaan yang terbagi dalam tiga area yaitu politik, ekonomi dan masyarakat sipil. Dalam setiap area terdiri dari tiga kategori informan ahli yaitu pro pemerintah, moderat dan anti pemerintah. Berikut indeks Indonesia dilihat dari kategori informan dalam tiga area tersebut.

Tabel 1: Indeks Demokrasi Indonesia Dilihat dari Kategori Informan

Kategori Informan	Area			Total
	Politik	Economi	Masyarakat Sipil	
Pro Pemerintah	5.91	4.93	5.2	**5.35**
Moderat	5.04	4.4	5.69	**5.04**
Anti-Pemerintah	5.56	3.38	4.37	**4.44**
Total	**5.50**	**4.24**	**5.09**	**4.9**

Secara keseluruhan dari tiga area, indeks Indonesia adalah 4.9 yang berarti cenderung berada di tengah jika diukur dari skala 0 hingga 10. Dilihat per area, indeks politik Indonesia paling tinggi yaitu 5.5, sementara indeks ekonomi Indonesia paling rendah yaitu 4.24.

Dapat ditambahkan bahwa indeks menurut informan ahli yang ada di kelompok pro Pemerintah dengan kelompok Moderat tidak memiliki banyak perbedaan yaitu masing-masing 5.35 dan 5.04. Perbedaan yang cukup tajam memang terjadi dengan indeks menurut informan ahli kelompok antiPemerintah yaitu 4.44.

III.1. Indeks Indonesia Dilihat dari Empat variabel Demokrasi

Dalam riset Asian Democracy Index ini, konsep demokrasi diturunkan pada dua prinsip utama yaitu Liberalisasi dan Equalisasi. Prinsip liberalisasi diturunkan dalam dua variabel yaitu otonomi dan kompetisi. Sedangkan prinsip equalisasi juga diturunkan dalam dua variabel yaitu pluralisasi dan solidaritas. Prinsip dan variabel tersebut kemudian dilihat dalam tiga area yaitu politik, ekonomi dan masyarakat sipil.

Hasil indeks Indonesia dalam **area politik** berdasarkan empat variabel demokrasi tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 2: Indeks Area Politik Indonesia Dilihat dari Empat Variabel

Kategori Informan	Variabel Demokrasi			
	Otonomi	Kompetisi	Pluralisasi	Solidaritas
Pro Pemerintah	7.33	5.67	5.58	4.93
Moderat	6.00	4.72	5.08	4.60
Anti-pemerintah	7.25	5.11	5.50	4.80
Total	**6.86**	**5.17**	**5.39**	**4.78**

Penilaian terhadap otonomi di area politik secara keseluruhan dinilai paling tinggi yaitu 6.86. Informan pro pemerintah, moderat dan anti-pemerintah memberikan penilaian yang tinggi

terhadap otonomi dalam area politik di Indonesia. Kalangan pro pemerintah cenderung memberi penilaian tinggi terhadap empat variabel, dibandingkan kalangan moderat dan anti-pemerintah. Tetapi otonomi yang tinggi dalam area politik ternyata tidak berkorelasi dengan penilaian kompetisi dalam area politik yang justru lebih rendah (5.17). Sementara itu, pluralisasi dalam area politik berada pada angka 5.39 dan solidaritas adalah 4.78.

Hasil indeks Indonesia dalam **area ekonomi** berdasarkan empat variabel demokrasi tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 3: Indeks Area Ekonomi Indonesia Dilihat dari Empat Variabel

Kategori Informan	**Variabel Demokrasi**			
	Otonomi	**Kompetisi**	**Pluralisasi**	**Solidaritas**
Pro Government	5.42	6.00	3.93	4.76
Moderate	5.75	5.50	2.53	4.33
Anti-government	3.83	3.25	2.80	3.62
Total	**5.00**	**4.92**	**3.09**	**4.24**

Hasil indeks ekonomi Indonesia memperlihatkan variabel otonomi dan kompetisi pada posisi lebih baik daripada solidaritas bahkan yang terburuk adalah pluralisasi. Variabel otonomi dan kompetisi berada pada kisaran angka 5.0 yang dapat diartikan sebagai posisi tengah.

Nilai variabel pluralisasi sangat rendah, atau dinilai negatif oleh para informan dari tiga kategori. Nilai indeksnya sangat rendah, yaitu 3.09. Informan kategori pro pemerintah cenderung menilai 'baik' variabel pluralisasai daripada kategori moderat dan anti pemerintah yang keduanya menilai pluralisasi dalam ekonomi Indonesia sangat buruk. Sementara variabel solidaritas memperoleh nilai 4.24 yang memberi sinyal kurang baik (arahnya negatif).

Hasil indeks Indonesia dalam **area masyarakat sipil** berdasarkan empat variabel demokrasi tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 4: Indeks Area Masyarakat Sipil Indonesia Dilihat dari Empat Variabel

Kategori Informan	**Variabel Demokrasi**			
	Otonomi	**Kompetisi**	**Pluralisasi**	**Solidaritas**
Pro Government	4.44	6.80	4.08	5.56
Moderate	4.78	7.27	5.17	5.56
Anti-government	4.17	5.27	3.00	5.11
Total	**4.46**	**6.44**	**4.08**	**5.41**

Hasil indeks area masyarakat sipil Indonesia memperlihatkan situasi yang menarik. Nilai variabel kompetisi paling tinggi dibandingkan tiga variabel lainnya. Dalam prinsip liberalisasi, otonomi masyarakat sipil lebih rendah dibandingkan kompetisinya (4.46 berbanding 6.44). Sedangkan dalam prinsip equalisasi, nilai solidaritas lebih baik daripada pluralisasi.

III.2. Indeks Indonesia Dilihat dari Prinsip Liberalisasi dan Equalisasi

Hasil kompilasi tiga area indeks Indonesia menurut empat variabel demokrasi adalah berikut ini.

Tabel 5: Indeks Indonesia Dilihat dari Empat Variabel Demokrasi

Area	Otonomi	Kompetisi	Pluralisasi	Solidatitas
Politik	6.86	5.17	5.39	4.78
Economi	5.00	4.92	3.09	4.24
Masyarakat Sipil	4.46	6.44	4.08	5.41
Total	**5.44**	**5.51**	**4.19**	**4.81**

Sementara itu tabel di bawah ini menunjukkan secara keseluruhan nilai prinsip liberalisasi lebih tinggi yaitu 5,48 dibandingkan dengan nilai ekualisasi yaitu 4,50. Tabel di bawah ini juga menunjukkan bahwa nilai indeks Indonesia 2011 relatif rendah yaitu 4,99.

Tabel 6: Indeks Demokrasi Indonesia 2011

Area	Liberalisasi	Equalisasi	Indeks Demokrasi Indonesia
Politik	6.01	5.08	
Economi	4.96	3.66	
Masyarakat Sipil	5.45	4.75	
Total	**5.48**	**4.50**	**4.99**

Bagian IV. INTERPRETASI DAN ANALISIS

Temuan-temuan riset pada bagian sebelumnya menggambarkan banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk memajukan demokrasinya. Bagian ini menguraikan pembacaan atas temuan-temuan riset tersebut. Dengan demikian, dapat ditelusuri kondisi-kondisi apa yang harus diperbaiki agar demokrasi Indonesia menjadi lebih baik.

IV.1. Analisis terhadap Empat Variabel

IV.1.a. Varibel Otonomi

Otonomi di area politik memiliki nilai indeks paling tinggi. Data menunjukkan bahwa otonomi di area politik memiliki indeks paling tinggi dibandingkan dengan nilai indeks otonomi di area ekonomi dan masyarakat sipil. Nilai indeks otonomi area politik adalah 6.86 sementara untuk area ekonomi bernilai indeks 5.0 dan masyarakat sipil memiliki nilai paling rendah dengan nilai 4.46.

Sebagian besar ahli menyatakan bahwa tingkat kekerasan negara jauh menurun dibandingkan masa Orde Baru. Kebebasan untuk membentuk organisasi politik serta melakukan protes melalui demonstrasi atau jalan lain juga dinilai mengalami peningkatan bila dibandingkan pada masa Orde Baru. Selain itu hak-hak sipil dijamin secara lebih baik pula. Di sini, hak atas kebebasan beragama mendapat catatan tersendiri disebabkan kasus Ahmadiyah. Kekerasan yang menimpa Ahmadiyah dan tidak adanya penanganannya secara baik oleh Pemerintah menjadi catatan untuk nilai otonomi.

Nilai indeks otonomi area masyarakat sipil paling rendah. Data menunjukkan otonomi di area ekonomi lebih buruk dibandingkan dengan politik. Sebagian besar ahli menyatakan bahwa terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara pelaku politik dan pelaku ekonomi. Hal ini menyebabkan beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah condong menguntungkan pihak-pihak tertentu. Perlindungan terhadap buruh masih buruk karena masih banyak praktek outsourcing dan pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Masih banyak perusahaan terutama sektor informal mempekerjakan anak-anak dalam operasinya meskipun sudah ada peraturan pembatasan umum minimal pekerja. Selain itu keberadaan lembaga keuangan internasional (IMF dan World Bank) masih terlihat dominan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Otonomi pada masyarakat sipil terlihat paling buruk yaitu 4.46 Meskipun sudah ada kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan membentuk organisasi, namun infrastruktur hukum belum berparadigma demokrasi. Beberapa kebijakan dinilai membatasi kebebasan menyatakan pendapat misalnya UU mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, UU pornografi dan pornoaksi, juga rancangan UU Intelejen dan rahasia negara. Selain itu sebagaian besar ahli menyatakan bahwa pengaruh perusahaan swasta dinilai sangat tinggi di bidang media massa. Meskipun ada perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar namun kebutuhan lainnya seperti kebutuhan listrik, air, pangan, kesehatan, jaminan sosial, dan lainnya jauh dari yang seharusnya.

IV.1. b. Variabel Kompetisi

Kompetisi di area masyarakat sipil lebih tinggi dibanding pluralisasi di area ekonomi dan politik. Data menunjukkan bahwa kompetisi di area masyarakat sipil paling tinggi (6.44) dibandingkan area ekonomi (4.92) dan politik (5.17). Kompetisi menjadi bagian dari liberalisasi yang mengukur beberapa item penting yaitu toleransi/inklusivitas, capability and publicity of volutary association, serta tranparency and diversity of volutary association.

Para informan umumnya sepakat bahwa keberadaan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia dinilai sangat banyak, mewakili nilai-nilai yang beragam dalam masyarakat dan cukup mewakili kepentingan umum. Selain itu dibanding dengan partai politik dan sektor swasta, LSM dinilai lebih terbuka dan transparan.

Pada item toleransi, para informan menilai jumlah LSM dan OMS di Indonesia sangat besar dan beragam. Namun demikian tidak semua organisasi masyarakat sipil mewakili nilai toleransi. Ada beberapa organsiasi masyarakat sipil yang juga menyuarakan nilai sebaliknya. Keragaman LSM terlihat dari adanya kelompok-kelompok yang mengkampanyekan hak asasi, pruralisme, toleransi hingga ada kelompok-kelompok yang anti-pluralisme dan anti-toleransi. Keberagaman LSM ini terlihat dari beragam kepentingan masyarakat sehingga bisa dikatakan LSM di Indonesia cukup mewakili semua kelompok masyarakat.

Jumlah organsisasi masyarakat sipil memang melonjak pasca jatuhnya Soeharto pada 1998. Era pasca Soeharto kebebasan masyarakat terbuka yang membuka kesempatan berbagai kelompok untuk membentuk organisasi. Data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia memperlihatkan pada tahun 2005 jumlah organisasi masyarakat sipil masih sekitar 3000 organisasi, sedangkan pada tahun 2010 jumlahnya meningkat menjadi 9000 organisasi. Jumlah yang besar ini tentunya mencerminkan berbagai nilai dan kebutuhan dalam masyarakat.

Dari sisi transparansi, LSM Indonesia dinilai jauh lebih maju daripada partai politik. Saat ini banyak LSM sudah mulai berupaya untuk beroperasi secara transparan. Mereka terbuka dan berbagi informasi kepada publik termasuk laporan finansial. Hal ini belum dilakukan oleh partai politik. Berbagai LSM juga sudah mulai menjalankan kaderisasi dan suksesi dengan cara yang demokratis.

Kompetisi di area politik dan ekonomi hampir setara. Kompetisi di area politik memiliki nilai indeks 5.17 dan hampir setara dengan ekonomi yaitu 5.92. Salah satu aspek yang masih buruk dalam praktik politik dan praktik ekonomi adalah sama-sama belum transparan. Bahkan dua area ini dinilai para informan memperlihatkan relasi yang saling menunggangi demi kepentingan masing-masing sekaligus menutup diri dari pengawasan publik. Transparansi di area ekonomi dinilai buruk oleh para informan. Meskipun praktik perusahaan sudah *go public* dan menerapkan transparansi finansial, namun ada banyak praktik uang yang tidak terungkap misalnya perpajakan dan kepemilikan perusahaan yang berlapis-lapis dimana susah diturut siapa pemilik sebenarnya.

Berkaitan dengan item kompetisi antar perusahaan di Indonesia, para informan menyatakan bahwa masih banyak perusahaan yang mendapatkan keistimewaan khusus melalui permainan

uang dengan pihak pemerintah. Semakin besar perusahaan, kompetisi semakin berlangsung secara tertutup hingga tidak adil. Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memang didirikan pada masa reformasi. Namun demikian, KPPU yang seharusnya mengawasi persaingan usaha, tidak memiliki cukup daya untuk mengawasi persaingan usaha.

IV.1.c. Varibel Pluralisasi

Pluralisasi di area ekonomi paling rendah. Pluralisasi di area ekonomi, politik dan masyarakat sipil tidak memiliki indeks yang menggembirakan. Bahkan luralisasi di area ekonomi jauh paling rendah (3.09) dibanding pluralisasi di area politik (5.39) dan masyarakat sipil (4.08). Di area ekonomi terdapat kenyataan bahwa aktifitas ekonomi dikuasai oleh kelompok-kelompok konglomerat. Bahkan konglomerat asing jauh lebih dominan daripada konglomerat dalam negeri. Sektor-sektor yang dikuasai konglomerat asing antara lain sektor migas, kelapa sawit, batu bara, dan juga perbankan.

Berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah memberi peluang lebar kepada pemodal asing untuk menguasai aktivitas perekonomian. Pemodal asing boleh menyewa tanah selama 90 tahun untuk aktifitas perusahaan. Pemodal asing juga diperkenankan memiliki saham bank di Indonesia lebih hingga 99%. Meskipun ada otonomi daerah, kesenjangan antar wilayah masih tinggi. Begitu juga dengan kesenjangan pendapatan dan penguasaan aset. Beberapa regulasi yang ditetapkan Presiden membolehkan pemodal asing berinvestasi di bidang ritel. Hal ini menyebabkan banyak sektor penting yang mendukung perekonomian Indonesia dikuasai oleh pemodal asing. Penguasaan aset oleh kelompok konglomerat terlebih pemodal asing menyebabkan kesenjangan pendapatan yang luar biasa.

Pluralisasi untuk area masyarakat sipil walau sedikit lebih tinggi dibandingkan area ekonomi, namun memiliki indeks yang relatif rendah. Hal ini terjadi karena media massa masih tidak lepas dari kepentingan bisnis dan politik pemiliknya. Media elektronik tidak menyediakan tayangan yang berkualitas bagi masyarakat. Kesenjangan akses informasi masih tinggi. Internet hanya dimonopoli oleh kelompok terpelajar. Akses terhadap perpustakaan dinilai buruk. Kurangnya pelayanan yang memfasilitasi masyarakat untuk melakukan aktifitas budaya.

Indeks nilai pluralitas di area politik paling tinggi. Pada masa reformasi telah pula dibentuk lembaga-lembaga untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas horisontal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Walaupun demikian, penjaminan mekanisme check and balances yang semakin baik menuntut integritas orang-orang yang ada di dalamnya dengan menjalankan pekerjannya dengan tulus dan jujur. Begitu juga dengan parlemen. Walaupun dipandang cukup mewakili, dicatat bahwa tidak semua orang yang duduk di parlemen menjalankan fungsinya secara maksimal.

IV.1.d. Varibel Solidaritas

Solidaritas di area ekonomi paling rendah. Solidaritas di area ekonomi memiliki indeks paling rendah (4.24) dibandingkan area politik (4.78) dan masyarakat sipil (5.41). Beberapa hal yang menyumbang pada rendahnya indeks solidaritas pada area ekonomi adalah aktifitas bisnis yang tidak menyediakan jaminan sosial dan tidak memunculkan aktifitas serikat buruh yang memungkinkan buruh terlibat dalam proses managemen dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Buruh tidak cukup terorganisir. Gerakan buruh terfragmentasi sehingga tidak mampu mengarahkan kekuatan untuk mendesakkan pemenuhan hak atas jaminan sosial yang memadahi. Cita-cita kelompok buruh untuk terlibat dalam praktik pengambilan keputusan di perusahaan masih sangat jauh. Buruh tak pernah berkesempatan memiliki saham perusahaan sehingga tidak ada berpeluang menghadiri rapat-rapat penting perusahaan. Kekuatan buruh dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga masih kecil.

Selain itu, kontrol masyarakat terhadap aktivitas perusahaan baik dari kelompok konsumen maupun kelompok lingkungan, masih lemah. Antusiasme masyarakat dalam turut serta mengurangi ketimpangan tidak terlalu besar. Beberapa organisasi keagamaan memang memiliki aktifitas pemberdayaan ekonomi, namun tidak sampai pada gerakan mengubah kebijakan.

Sementara nilai indeks solidaritas di area politik juga cukup rendah. Para informan menyatakan walaupun masyarakat tampak aktif dalam pemilihan umum namun kurang berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Selain itu tindakan affirmatif untuk perempuan di bidang politik sudah terlihat cukup dengan adanya quota 30%, namun bermasalah saat pelaksanaannya. Kepercayaan publik terhadap pemerintah rendah akibat berbagai kasus korupsi yang tidak terselesaikan. Sedangkan kepercayaan publik kepada parlemen juga tidak begitu bagus. Namun begitu masyarakat cukup terlihat percaya pada demokrasi.

Nilai solidaritas di area masyarakat sipil terlihat paling bagus dibandingkan area lain. Walaupun ada catatan untuk kelompok disabilitas, lanjut usia, maupun kelompok minoritas lainnya, namun terdapat tindakan afirmatif untuk kelompok perempuan dan bidang pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas LSM dinilai masih rendah tapi terus menguat. Organisasi masyarakat sipil dinilai memiliki cukup pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini memang tergantung isu yang menjadi area kerja mereka. LSM anti korupsi saat ini dinilai memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam pembuatan kebijakan dibandingkan dengan LSM yang bekerja pada isu lain.

IV.2. Analisis terhadap Prinsip Utama Demokrasi: Liberalisasi dan Equalisasi

Indeks equalisasi area ekonomi paling rendah, liberalisasi area politik paling tinggi. Data menunjukkan bahwa equalisasi di area ekonomi (3.66) memiliki indeks paling rendah dibandingkan area politik (5.08) dan masyarakat sipil (4.75). Rendahnya equalisasi di area ekonomi nampaknya disumbang oleh angka pluralisasi yang sangat rendah (3.09) dan indeks solidaritas yang relatif rendah pula (4.24). Angka solidaritas area ekonomi juga paling rendah bila dibandingkan dengan solidaritas di dua area lain.

Monopoli di area ekonomi dinilai masih tetap terjadi dimana kelompok tertentu masih menguasai ekonomi. Kesenjangan aset justru lebih serius terjadi pada masa demokrasi dibandingkan masa sebelumnya. Penguasaan kelompok bawah atas tanah semakin lama semakin sedikit. Sementara itu, kesetaraan pendapatan belum tercipta dimana 20% penduduk dengan pendapatan tertinggi menguasai porsi yang lebih besar dari tahun ke tahun, sementara 40% penduduk dengan pendapatan terendah menguasai pendapatan nasional yang semakin lama semakin menurun. Lebih jauh, kesenjangan ekonomi antar wilayah masih merupakan masalah yang sangat serius. Kue ekonomi memang dipandang mulai terdistribusi dengan adanya otonomi daerah. Namun demikian, kue ekonomi tidak terdistribusi hingga kelompok bawah dan kehilangan perannya dalam menyejahterakan rakyat terutama di wilayah yang selama ini sangat tertinggal yaitu Indonesia bagian timur.

Equalisasi dipakai untuk mengukur proses sejauh mana kelompok minoritas atau pun subaltern secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Ekualisasi dengan demikian adalah sebuah proses transformasi kekuasaan di setiap bidang yaitu politik, ekonomi maupun masyarakat sipil. Dari indeks yang dihasilkan menunjukkan equalisasi yaitu transformasi kekuasaan dalam area ekonomi tidak terjadi yang berarti tidak ada pula kesetaraan akses pada sumber daya ekonomi.

40 Wealthiest Citizens

	Total wealth (US$ billions)	*Average wealth (US$ billions)*	*Total wealth as % of GDP*	*Wealth Concentration Index*
Indonesia	71.3	1.78	10.3	6.22
Thailand	36.5	0.91	11.7	1.95
Malaysia	51.3	1.28	23.4	1.65
Singapore	45.7	1.14	21.0	0.25

Source: *Forbes* magazine 2010 "40 Richest" reports for various Asian countries and author's calculations.

Sumber: Winters (2011)

Data tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan di Indonesia memiliki nilai indeks sangat tinggi bila dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Winters mengatakan bahwa Concentration of Wealth di Indonesia adalah 3 kali lipat Thailand, hampir empat kali lipat Malaysia, dan dua puluh kali lipat Singapura.[36]

[36] Paparan Prof. Jeffrey A. Winters, *Ancaman Oligarki dan Masa Depan Politik Indonesia*, dalam diskusi yang diselenggarakan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Jakarta, 1 Juni 2011

Liberalisasi di area ekonomi juga memiliki nilai indeks paling rendah (4.96) dibandingkan dengan liberalisasi di area masyrakat sipil (5.45) dan area politik (6.01). Liberalisasi dipakai untuk mengukur sejauh mana sektor-sektor yang berbeda memperoleh independensi dan otonomi dari kekuuatan politik otoriter lama dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Hal ini sangat tergantung pada sejauh mana monopoli kekuatan lama terdisintegrasi. Angka liberalisasi ekonomi yang juga rendah bila dibandingkan dengan bidang lain dapat menjelaskan ekualisasi bidang ekonomi yang juga rendah itu. Demokrasi yang ada tidak begitu berhasil dalam melakukan liberalisasi ekonomi dimana ekonomi masih tetap tidak otonom terutama dari politik. Terdapat hubungan yang saling menguntungkan antara elit politik dan ekonomi dan jauh dari transparan. Kegagalan liberalisasi bidang ekonomi menghambat ekualisasi di bidang ekonomi. Rendahnya nilai indeks ekonomi baik untuk prinsip liberalisasi maupun ekualisasi menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia memiliki permasalahan yang besar pada bidang ekonomi.

Nilai indeks equalisasi lebih rendah dibandingkan liberalisasi. Data menunjukkan bahwa dua prinsip utama demokrasi yaitu liberalisasi dan ekualisasi sama-sama memiliki nilai indeks yang relatif rendah. Namun, prinsip ekualisasi memiliki indeks lebih rendah (4.50) sementara liberalisasi sedikit lebih tinggi (5.48). Nilai indeks dari prinsip-prinsip utama demokrasi untuk Indonesia tidaklah menggembirakan. Dari dua angka ini dapat dinyatakan bahwa demokrasi Indonesia berada pada posisi tengah dan mengandung ancaman untuk dapat sewaktu-waktu mengalami kemunduran (*set back)*.

Data juga menunjukkan dua variabel turunan dari prinsip ekualisasi memiliki nilai yang rendah. Nilai indeks pluralisasi total memiliki nilai indeks paling rendah (4.19). Di sini harus kita cermati pula bahwa angka pluralisasi paling rendah dibandingkan dengan otonomi, kompetisi, dan solidaritas dimana pluralisasi ekonomi juga paling rendah. Sementara itu angka solidaritas total adalah 4.81 yang merupakan angka terendah setelah otonomi dan kompetisi.

Nilai indeks liberalisasi untuk semua area lebih tinggi bila dibandingkan nilai indeks ekualisasi. Liberalisasi pada area politik memang sudah berjalan. Begitu juga dengan liberalisasi masyarakat sipil. Liberalisasi masyarakat sipil walau tak serendah ekonomi, namun memiliki catatan dengan tingginya pengaruh perusahaan swasta pada bidang media massa. Pengaruh pihak swasta dalam media massa mengakibatkan ketimpangan dalam wacana publik. Setelah reformasi, Indonesia memang memiliki banyak media. Namun kepemilikan media terpusat pada kelompok tertentu. Hal ini mengakibatkan ketimpangan wacana publik dimana kelompok tertentu mendominasi wacana publik.

IV.3. Analisis terhadap Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks ekonomi paling rendah dibanding politik dan masyarakat sipil. Indeks ekonomi memiliki nilai paling rendah (4.24) dibanding total indeks politik (5.5) dan masyarakat sipil (5.09). Hal ini terutama dipengaruhi oleh indeks equalisasi ekonomi yang mencapai angka jauh di bawah rata-rata (3.72).

Data ini mengindikasikan bahwa proses **demokratisasi di Indonesia masih belum sanggup mengatasi monopolisasi atas sumber-sumber daya politik, sosial dan terutama ekonomi**. Konsentrasi sumber-sumber daya ekonomi dan akses pada sumber-sumber daya tersebut masih terus terjadi. Sejumlah informan kunci mengungkapkan bahwa aktivitas ekonomi didominasi oleh segelintir konglomerat dan kekuatan ekonomi asing. Mereka terutama menguasai industri-industri ekstraktif yang padat modal. Ketimpangan yang dalam atas akses pada sumber-sumber daya ekonomi ini pada gilirannya mengakibatkan kesenjangan pendapatan. Sementara itu, desentralisasi – yang merupakan agenda untuk tidak memusatkan sumber-sumber kekuasaan di pusat -- juga tidak cukup berhasil mengatasi disparitas ekonomi antarwilayah.

Ketimpangan ini semakin dalam karena Indonesia belum memiliki sistem jaminan sosial yang dapat berguna untuk mendisintegrasikan monopoli tersebut (demonopoli pemusatan sumber-sumber kekuasaan ekonomi). Sementara serikat-serikat buruh meskipun semakin 'tebal' aktivitas dan jumlahnya tetapi tidak cukup berhasil membangun kekuatan yang solid. Lebih dari itu, kepedulian untuk mengawasi kinerja bisnis juga masih sangat lemah.

Rendahnya indeks bidang ekonomi ini juga disumbangkan oleh lemahnya regulasi untuk me-demonopoli penguasaan sumber-sumber daya ekonomi. Sebagai contoh, kebijakan deregulasi perbankan memungkinkan modal asing menguasai 95% saham di bank-bank di Indonesia. Dalam penelitian ini kualitas dari liberalisasi yang berarti kebebasan dari monopoli dinilai oleh para informan berada di titik tengah (4.96).

Usaha demonopolisasi proses demokrasi tidak cukup dilakukan pada aspek politik. Liberalisasi politik dan sosial pasca jatuhnya pemerintahan otoriter setelah lebih dari satu dekade tampaknya tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap demonopolisasi sumber-sumber kekuasaan ekonomi. Penelitian ini menunjukan bahwa memang telah ada liberalisasi di area politik – dan fakta itu diterima secara umum baik oleh yang mendukung, menolak, maupun mengambil posisi tengah.

Mungkin tidak terlalu terburu-buru untuk mengatakan bahwa masih kuatnya sistem monopolistik di area ekonomi mengakibatkan kualitas dari liberalisasi dan ekualisasi di bidang politik dan sosial tidak maksimal. Dengan kata lain gagalnya demonopolisasi ekonomi berimplikasi pada capaian kualitas demonopolisasi bidang politik dan sosial. Hal ini kita temukan pada berbagai komentar informan yang mengungkapkan betapa kencangnya kekuatan bisnis mempengaruhi politik serta masyarakat sipil.

Ruang-ruang publik termasuk media sangat dikendalikan oleh kekuatan ekonomi. Sebagai akibatnya terjadi jurang informasi yang dalam. Kepemilikan media oleh kelompok tertentu adalah cerminan dari tidak meratanya akses pada informasi dan sebaran informasi. Hal yang hendak diinformasikan kepada publik ditentukan oleh pemilik media. Demikian pula dampaknya pada akses atas aktivitas dan fasilitas budaya. Banyak sudah kelompok-kelompok seni yang tidak dapat terus melakukan ekspresi budaya. Disamping itu ruang publik dalam arti fisik dipenuhi oleh mall dan pom bensin, yang lebih merepresentasikan kepentingan bisnis.

Implikasinya adalah hilangnya kewargaan. Ketika kekuasaan ekonomi begitu besar, maka bukan warga negara yang ada – melainkan konsumen. Riset ini menunjukan bahwa meskipun terdapat

afirmasi di bidang politik khususnya untuk perempuan namun tidak berlaku untuk pemberdayaan masyarakat sipil. Dan, tingkat partisipasi warga negara baik secara politis maupun di ranah masyarakat sipil juga masih rendah.

Mengapa indeks demokrasi Indonesia masih rendah?

Menurut penelitian ini indeks demokrasi Indonesia berada di bawah angka 'rata-rata' (4.99) – menggambarkan bahwa 'demonopolisasi' bahkan belum setengah jalan. Masih banyak agenda yang perlu dirumuskan dan dilakukan untuk itu. Akan tetapi mengatakan 'setengah jalan' tidak banyak artinya jika tidak masuk lebih dalam untuk mengidentifikasi bagian-bagian penting yang masih kurang.

Buruknya kualitas demonopolisasi terutama dipengaruhi oleh prinsip-prinsip *equalisation*. Secara lebih spesifik equalisasi bidang ekonomi. Jika kita melihatnya dari segi pluralisasi maka kita temukan bahwa buruknya ekualisasi itu terjadi pada ekonomi (3.09) dan masyarakat sipil (4.08). Sedangkan ketika kita melihatnya dari sudut solidaritas maka politik (4.78) dan lagi-lagi ekonomi (4.24) banyak mempengaruhi buruknya kualitas (indeks) tersebut.

Sementara itu ditemukan bahwa prinsip liberalisasi yang dimaksudkan untuk menggambarkan proses mengembalikan otonomi di masing-masing bidang mencapai angka diatas 'rata-rata' (5.44 dan 5.51 atau 5.48 secara keseluruhan). Hal ini terutama terjadi pada liberalisasi di bidang politik (6.86 dan 5.17). Kebebasan dari monopoli (liberalisation from monopoly) di area politik di atas 'rata-rata' namun tidak terjadi di area ekonomi dan masyarakat sipil.

Bagaimana memaknai hal ini? Bobot liberalisasi lebih berat (5.48) dari ekualiasasi (4.50). Meski demikian, cakupan liberalisasi masih tidak terlalu luas atau jauh. Liberalisasi di area politik masih sangat terbatas dan lebih terbatas lagi di area masyarakat sipil. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen-instrumen formal <u>politik</u> untuk demonopolisasi telah tersedia sementara dominasi kekuatan-kekuatan <u>sosial</u> tertentu tidak lagi terjadi di Indonesia. Kekuatan-kekuatan sosial politik mulai terpencar ke berbagai kelompok. Di tataran masyarakat ada penghargaan terhadap inklusifitas budaya, agama, bahasa, ras/suku serta perbedaan ide. Hanya segelintir kelompok minoritas yang menolak adanya inklusifitas tersebut. Namun tidak serta merta masyarakat sipil cukup otonom dari berbagai kekuatan lain (terutama ekonomi).

Ketersediaan ini tidak disertai dengan adanya transformasi yang signifikan dalam hubungan kekuasaan terutama di bidang ekonomi [3.66] dan masyarakat sipil [4.75]. Bahkan dalam bidang politik, transformasi itu bersifat *mediocare* [hanya 0.8 di atas rata-rata].

Menarik untuk dilihat bahwa dua kelompok antagonis pro government dan anti pemerintah memberi nilai tinggi pada keberhasilan membangun 'otonomi'. Dalam hal otonomi di area politik baik pro maupun anti pemerintah memiliki pandangan (nilai) yang sama tentang proses demokrasi di Indonesia.

Pro pemerintah ternyata tidak selamanya melihat bahwa proses demokratisasi telah berhasil melakukan demonopolisi sumber-sumber kekuasaan. Hanya di area otonomi kelompok ini melihat demonopolisasi mencapai nilai yang tinggi (7.33). Mungkin hal ini menggambarkan

kecendrungan pro pemerintah untuk memberi nilai tinggi akan pentingnya ‘peran negara yang minimalis’.

Demikian pula di kalangan masyarakat sipil. Gambaran ini mungkin mengindikasikan *gravity* dari gerak advokasi yang selama ini dibawa oleh masyarakat sipil yaitu menitikberatkan pada ‘kebebasan dari kendali kekuasaan negara’. Dan agenda tersebut memang tercapai. Bukan saja kelompok-kelompok masyarakat sipil menjamur (density) namun juga aktivitasnya pun (vibrant) cukup tinggi. Sementara bidang-bidang lain anti pemerintah berada di angka ‘moderat’.

Hampir semua informan berpendapat bahwa demonopolisasi di bidang ekonomi hampir tidak terjadi. Catatan kecil perlu diungkapkan bahwa pro pemerintah [5.42 & 6] dan kaum moderat [5.75 & 5.50] melihat bahwa liberalisasi di bidang ekonomi tercapai secara ‘moderat’. Hanya kelompok anti pemerintah yang melihat bahwa liberalisasi ekonomi tidak terjadi. Semua kelompok sepakat bahwa tidak terjadinya demonopolisasi secara signifikan terutama sebagai akibat dari ekualisasi yang rendah.

Kaum moderat dan pro pemerintah melihat bahwa kompetisi masyarakat sipil memiliki nilai tinggi. Hal ini menunjukan bahwa baik pro pemerintah maupun moderat menilai pentingnya kontribusi peran masyarakat sipil. Disamping itu hal ini mengindikasikan bahwa penilaian dari kedua kelompok ini tentang demonopolisasi terutama di area masyarakat sipil lebih baik dibanding pandangan dari kelompok anti pemerintah, khususnya menyangkut akuntabilitas.

Dalam hal pluralisasi arena masyarakat sipil, kelompok anti pemerintah masih melihat rendahnya persamaan akses atas sumber-sumber daya sosial seperti informasi dan kebudayaan. Pengetahuan, informasi, dan pengembangan nilai-nilai budaya oleh anti pemerintah dianggap masih didominasi oleh kekuatan tertentu.

Bagian V. KESIMPULAN

Skor Indonesia dalam penelitian Asian Democracy Index ini adalah 4,99. (dalam skala 0-10) Skor yang menunjukkan masih problematiknya wajah demokrasi Indonesia saat ini setelah rentang 13 tahun transisi paska otoriterisme. Secara psikologis memberikan peringatan yang keras tentang wajah demokrasi di Indonesia bila dibandingkan berbagai index demokrasi lainnya yang menempatkan Indonesia di atas nilai 5.

Angka indeks mengindikasikan adanya perkembangan dan pencapaian yang timpang antara konsep penopang demokrasi dalam proses transisi yang berlangsung hingga saat ini. Demokrasi Indonesia ditopang oleh liberalisasi politik yang cukup tinggi namun secara kontras tidak dikuti oleh ekualisasi di area ekonomi yang sangat rendah. Ekualisasi ekonomi adalah komponen nilai indeks yang terendah dalam seluruh komponen nilai indeks. Sementara itu peranan masyarakat sipil tergolong *mediocre* dan kurang berperan signifikan dalam mendinamisasi perubahan-perubahan demokratik terhadap setting sosial yang sebelumnya dipenuhi oleh monopoli kekuatan-kekuatan oligarkis. Liberalisasi dan ekualisasi di medan masyarakat sipil tergolong rendah.

Temuan indeks dari riset ini seolah mengkonfirmasi berbagai kritik para ahli tentang fenomena oligarki yang menjadi masalah serius yang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini. Berbagai sumberdaya yang penting dalam relasi sosial dan ekonomi masih terkelola dalam kaitan yang erat dengan kekuatan-kekuatan elit lama yang telah menikmati monopoli sejak masa otoriter. Di bidang politik tersedia banyak perkembangan kelembagaan dan prosedural yang memberi kesempatan ruang otonomi baru dalam kontestasi politik formal seperti pemilu nasional maupun lokal. Muncul banyak wajah baru yang muncul di panggung politik, tapi belum berarti wajah-wajah baru ini terlepas sama sekali dari kekuatan politik oligarkis karena untuk terlibat dalam politik dibutuhkan biaya yang besar. Kemunculan alternatif-alternatif dari masyarakat sipil pun belum cukup banyak dan kurang siginifikan pengaruhnya di arena politik.

Tampaknya demonopolisasi yang lebih tinggi terjadi di arena politik belum mampu mendorong demonopolisasi di arena ekonomi dan masyarakat sipil. Liberalisasi yang tinggi hanya mungkin bila terjadi perubahan substansial atas kekuatan elitis yang sebelumnya memonopoli. Kekuatan baru harus mampu melakukan transformasi agar menghadirkan tingkat demokrasi yang tinggi. Tampaknya kapasitas transformasi untuk dapat melampui hambatan monopoli adalah masalah yang signifikan ditemukan dari riset ini. Kemampuan transformasi yang masih lemah mengakibatkan ketidakmampuan mengoptimalkan peluang demokratisasi yang telah menghadirkan lapangan politik dan masyarakat sipil yang cenderung otonom dan mampu menghadirkan prosedur serta aturan-aturan baru.

Kesimpulan berbagai riset yang pernah menyimpulkan bahwa demokrasi Indonesia telah terkonsolidasi harus dikritisi secara tajam. Konsolidasi di area ekonomi dan masyarakat sipil harus mulai dilihat terkait erat dengan demokrasi politik yang kaya dengan perubahan selama 13 tahun terakhir ini. Kekuatan-kekuatan yang memonopoli area ekonomi terus menjadi hambatan bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia secara substansial. Monopoli masih sangat kuat di arena ekonomi dan memiliki imbas pada bidang politik dan masyarakat sipil.

Indeks Demokrasi Asia ini dapat menjadi pintu masuk untuk penelaahan yang lebih rinci tentang analisa proses transisi demokrasi, terutama bagi konteks Indonesia. Berangkat dari metode yang sudah dibangun dalam riset ini tampaknya dapat dikembangkan penelitian lanjutan yang lebih menekankan pemeriksaan dan pemetaan tentang bagaimana monopoli sumberdaya dan kuasa di arena politik, ekonomi, dan masyarakat sipil menjadi hambatan bagi kualitas demokrasi yang substansial.

Catatan penting untuk agenda demokratisasi ke depan adalah pentingnya melihat keterkaitan dari ketiga bidang tersebut dalam pengaruhnya terhadap nilai indeks demokrasi secara keseluruhan. Kabar baik dari potret demonopolisasi di bidang politik yang telah mampu mencapai tingkat liberalisasi yang cukup tinggi harus didorong terus sebagai faktor bagi transformasi yang memungkinkan liberalisasi dan ekualisasi di bidang lainnya. Transisi demokrasi yang terfokus pada liberalisasi politik harus dapat didorong lebih jauh terutama dengan mendorong peluang di bidang politik dan peranan masyarakat sipil untuk mulai mengupayakan demonopolisasi di bidang ekonomi yang semakin menjadi tantangan bagi masa depan transisi demokrasi di Indonesia.

***

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aspinall, E. dan Mietzner,M., (2010), "Problems of Democratisation in Indonesia; An Overview", dalam Aspinall, E. dan Mietzner,M (ed), *Problem of Democratisation in Indonesia; Elecyions, Institutions and Society*

Bastian, I., (2007) *Akutansi LSM dan Partai Politik*, Jakarta, Penerbit Erlangga
http://books.google.co.id/books?id=XVXJhEO13pQC&pg=PA37&lpg=PA37&dq=jumlah+LSM+meningkat+di+indonesia&source=bl&ots=IK-MK8G7db&sig=JVYXNvn2fkzIPUb8aCSfUPUh3U&hl=id&ei=qdlRTqaRHYTqrAeK3vCsAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CB0Q6AEwAQ#v=onepage&q=jumlah%20LSM%20meningkat%20di%20indonesia&f=false

Diamond, L., (2010), "Indonesia's Place in Global Democracy", dalam dalam Aspinall, E. dan Mietzner,M (ed), *Problem of Democratisation in Indonesia; Elecyions, Institutions and Society*

Laporan Penilaian Demokrasi Indonesia

Freedom in the World 2011, Freedom House. Indonesia diberi nilai 2 untuk hak politik dan 3 untuk hak-hak sipil dalam skala 1-7, dimana 1 untuk paling bebas dan 7 paling tidak bebas.

Economist Intellegence Unit,, *Democracy Index 2010, Democracy in Retreat*, http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf, diakses pada 22 Agustus 2011

Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Assi Manusia, DEMOS, *SATU DEKADE REFORMASI:Maju dan Mundurnya Demokrasi di Indonesia Ringkasan Eksekutif dan Laporan Awal Survei Nasional Kedua Masalah dan Pilihan Demokrasi di Indonesia (2007 – 2008*)

UNDP, *Menakar Demokrasi di Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia 2009,* diterbitkan pada 2011

Terbitan Lembaga/Catatan/Paparan dan lain-lain

Lihat buku "Saran dan Pertimbangan Terhadap Rancangan Perpres Tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan toko Modern" dikeluarkan oleh KPPU.

The Asian Democracy Index, A Short Guide, prepared by The Democracy and Social Movement (DASMI) of Sungkonghoe University, for the Presentation in the 2010 Seoul Democrcay Index Forum and Workshop 14-15 Octrober 2010

Kata Pengantar oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida S. Alisyahbana dalam *Menakar Demokrasi di Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia 2009,* UNDP, 2011

Catatan Direktur of Public Affairs, Indonesian Survey Institute, Burhanuddin Muhtadi (tidak dipublikasikan) dalam Dinner Lecture "Demokrasi dan Ukuran-ukurannya; Sebuah Persoalan" yang diselenggarakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Jakarta, 9 Agustus 2011

Paparan Prof. Jeffrey A. Winters, *Ancaman Oligarki dan Masa Depan Politik Indonesia,* dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Jakarta, 1 Juni 2011

Artikel di Media Massa dan Berita Media Massa dan Internet

Endy M. Bayuni, *Indonesia Risk Downgrade of Its Democratic Rating*, diakses di http://www.thejakartapost.com/news/2011/08/20/indonesia-risks-downgrade-its-democratic-rating.html pada 22 Agustus 2011

Kompas, 30 Agustus 2010 dengan berita berjudul "Wow, Jumlah Ormas Mencapai 9.000!" http://regional.kompas.com/read/2010/08/30/14370020/Wow.Jumlah.Ormas.Mencapai.9.000.

Tjahjo Kumolo, dalam "Catatan 1 Mei" diakses dari http://www.tjahjokumolo.com/?p=1453 dan diakses pada 23 Agustus 201

Annex

List of Experts
ASIAN DEMOCRACY INDEX 2011

Categorization of EXPERT/ AREA		Pro-government	Moderate	Anti-Government
ECONOMY	Practicioners / Bussiness-persons	Female, economist and a member in an economic advisory body works for the president.	Male, listed at number 29 on the list of the wealthiest businesspersons in Indonesia according to Forbes Magazine)	Bussinessperson, also founder of a social democratic political Non-Government Organization
	Academician/ researcher	Senior economist nd lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia. Works closely with the vice president office.	Male, Senior lecturer at the Faculty of Economics, University of Indonesia. A non partisant activist.	Female4, Executive Director of a think tank organization on economy and trade. A critical economic pundit in mass media.
	Decision Makers (Ministers/Legislators, etc)	Chairperson of the Investment Coordinating Board	Male, Legislator from the supposedy opposition party.	Female, Legislator from the supposedly opposition party.
POLITICS	Practicioner	Male, long time CSO activist now joining the ruling party. (Politician / Head of the Policy and Strategy Development Center)	Male, (Media activist / Adjunct Professor in PR and Journalism at a University in Australia).	Male, (Leader of, one of the two biggest Muslim organizations in Indonesia, in 1998-2005.
	Academics / Researchers / Intellectuals	Male, Senior board in one of the oldest think tank institute in development studies and a visiting lecturer military school and State Administration Institution	Male, Professor in Political Science and Senior Researcher at the Indonesian Institute of Sciences)	Female, (Lecturer at the Political Science Department, University of Indonesia)
	Decision Makers (legislators, State Aparratus, etc)	Male, Doctor in Law, Special Adviser for Legal Affairs to President Susilo Bambang Yudhoyono's)	Male, Legislator from the Indonesian Democratic Party – Struggle / PDIP) The supposedly opposition party	Female, Legislator from the National Awakening Party / PKB), a party who joins the coalition with the ruling one. But she actively attacking the government scandals.

Categorization of EXPERT/ AREA		Pro-government	Moderate	Anti-Government
CIVIL SOCIETY	Watch dog Organization	Male, Representative of Indonesia. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights)	Ex executive Director of One of the nation wide NGO network works in social empowerment.	Male, Program Director at A Human Rights Watchdog)
	Mass based Organization	Male, One of the Chairs of the Central Board of the largest grassroots Islamic organization in Indonesia).	Female, The chairwoman of the women's branch of Indonesia's largest Muslim organization,	Male, Chair of Advocacy Division, the hard-line Muslim group,
	Academician/ researcher/intellectual	Male Deputy director of research center that actively promoting liberalism	Male, Journalist and former deputy chair of Indonesia's Press Council)	Female, Lecturer - University of Indonesia / expert staff member of the Women's Empowerment Movement (GPSP)